TESIS

PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DAN KEDUDUKAN HUKUM *UPLINE* DALAM INVESTASI *ONLINE* ILEGAL (PT NEW WORLD SPORT) DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : INDRI SUHADI

NPM : 245215744

Konsentrasi : Litigasi

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	**Indri Suhadi**
Nomor Mahasiswa	:	**245215744**
Konsentrasi	:	**Litigasi**
Judul	:	PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DAN KEDUDUKAN HUKUM *UPLINE* DALAM INVESTASI *ONLINE* ILEGAL (PT NEW WORLD SPORT) DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama Pembimbing	Tangal	Tanda Tangan
1. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.	7/7 26	
2. Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.	2/7 26	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama	:	Indri Suhadi
Nomor Mahasiswa	:	245215744
Konsentrasi	:	Litigasi
Judul	:	PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DAN KEDUDUKAN HUKUM *UPLINE* DALAM INVESTASI *ONLINE* ILEGAL (PT NEW WORLD SPORT) DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal :

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Prof. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.	.....
2. Sekretaris	Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum	.....
3. Anggota	Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum	.....

Ketua Program Studi

Dr. H. Rhiti, SH.,LL.M

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

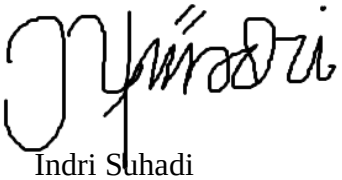
Nama : Indri Suhadi

NPM : 245215744

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul " PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DAN KEDUDUKAN HUKUM *UPLINE* DALAM INVESTASI *ONLINE* ILEGAL (PT NEW WORLD SPORT) DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA " adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, Juli 2026

Yang menyatakan



Indri Suhadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kekuatan, kebahagiaan serta kelancaran selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan tesis dengan judul "PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DAN KEDUDUKAN HUKUM *UPLINE* DALAM INVESTASI *ONLINE* ILEGAL (PT NEW WORLD SPORT) DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA " yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada:

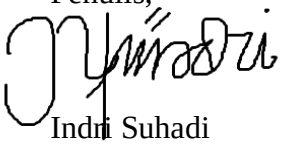
1. Yth Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yth Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yth Bapak Dr. H. Rhiti, SH.,LL.M selaku Kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh S2 di Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.
4. Yth Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum., sebagai dosen pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat berharga bagi kelancaran tesis.
5. Yth Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum yang selama ini telah berbagi ilmu pengetahuan hukum serta wawasan.
6. Yth. Pimpinan dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan administratif dan fasilitas akademik selama penulis menempuh pendidikan.

7. Yth. Rekan-rekan seangkatan Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Orang tua, mertua dan anak istri yang dengan sabar memahami berkurangnya waktu buat keluarga.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah berjasa membantu selama menempuh perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, Juli 2026

Penulis,



Indri Suhadi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS i
PENGESAHAN UJIAN TESIS ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI vi
ABSTRAK.....viii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Keaslian Penelitian 16
F. Batasan Konsep 24
BAB. II
A. TINJAUAN PUSTAKA 26
1. Kajian Tentang Penetapan Tersangka 26
2. Kajian Tentang Kedudukan Hukum 30
3. Kajian Tentang Investasi *Online* ilegal 33
B. LANDASAN TEORI 36
1. Teori *Joint Criminal Enterprise* (JCE) 36
2. Teori *Beneficial Ownership* 39
3. Teori *Due Process of Law* 40
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 44
C. Data Penelitian 45
D. Metode Pengumpulan Data 47
E. Metode Analisis Data 48
F. Proses Bernalar 50

G. Sistematika Tesis 50
BAB IV. PEMBAHASAN
A. Upaya Institusi Polri Dalam Menangani Penyerahan *Upline* Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 53
1. Tupoksi Polri Sebagai Pemelihara Harkamtibmas 53
2. Tupoksi Polri Sebagai Penegak Hukum 55
3. Permasalahan Penanganan Perkara Investasi Online Ilegal 60
4. Diskresi Kepolisian.....63
B. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Penanganan Kasus Investasi *Online* Ilegal Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP 67
C. Kedudukan Hukum Upline Dalam Kasus Investasi Online Ilegal 74
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Problematika Hukum Penetapan Tersangka Dan Kedudukan Hukum *Upline* Investasi *Online* Ilegal (PT New World Sport) Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya institusi Polri dalam menangani penyerahan *upline* dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penetapan tersangka oleh penyidik dalam penanganan kasus investasi *online* ilegal dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kedudukan hukum *upline* dalam kasus investasi *online* ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana investasi *online* ilegal, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat para ahli, dan hasil wawancara dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *upline* tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesengajaan, peran aktif, penguasaan terhadap sistem, serta kontribusi nyata dalam menjalankan atau mengembangkan investasi ilegal. Penetapan tersangka oleh penyidik harus berdasarkan minimal dua alat alat bukti yang syah, serta menjunjung tinggi asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap investasi *online* ilegal harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penyidik dituntut tidak hanya mengedepankan efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga memastikan setiap penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti, prosedur hukum yang sah, serta penghormatan terhadap prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *due process of law*, kedudukan hukum, investasi *online* ilegal, penetapan tersangka, *upline*.

ABSTRACT

This thesis is titled "Legal Issues Regarding Suspect Designation and the Legal Status of Uplines In Illegal Online Investment Schemes (PT New World Sport) at the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Special Region Regional Police. The study aims to examine and analyze the efforts of the Indonesian National Police (Polri) in handling uplines viewed through the lens of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police as well as the designation of suspects by investigators in illegal online investment cases (under the Criminal Procedure Code/KUHAP) and the legal status of uplines in such cases. This research employs a normative legal research method utilizing both statutory and conceptual approaches. Research materials consist of primary sourcesspecifically legislation related to illegal online investment crimes and secondary sources, including books, journals, expert opinions, and interviews with relevant informants. The findings indicate that uplines cannot automatically be held criminally liable; instead, it must first be proven that there was intent, an active role, control over the system, and a tangible contribution to the operation or expansion of the illegal investment scheme. Suspect designation by investigators must be based on at least two pieces of valid evidence and must uphold the principles of legality, proportionality, accountability, and respect for human rights. In conclusion, law enforcement regarding illegal online investments must be conducted professionally, objectively, and with a focus on protecting human rights. Investigators are required not only to prioritize the effectiveness of crime eradication but also to ensure that every suspect designation is based on at least two pieces of evidence and valid legal procedures, while respecting the principles of due process of law and human rights.

***Keywords**: due process of law, legal standing, illegal online investment, naming of a suspect, upline.*